

STRATEGI PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI EDUKASI OSS DAN PENDAMPINGAN PEMBUATAN NIB DI DESA SRIWEDARI

WILDA RISYDIYANI^{*1}, MIQDAM MAUFUR², ALI ROHMAT³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Agama Islam Syubbanul Wathon Magelang, Indonesia

e-mail co Author: ^{*1}wildarisdiyani@gmail.com

ABSTRAK

Mayoritas pelaku UMKM di Dusun Ngoman Lor, Desa Sriwedari, Magelang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), yang berdampak pada terbatasnya akses terhadap pembiayaan, kemitraan usaha, dan program pemerintah. Program pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas pelaku UMKM dalam mengurus legalitas usaha secara mandiri melalui edukasi dan pendampingan penggunaan sistem Online Single Submission (OSS). Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang terdiri dari tiga tahap: observasi (research), tindakan (action), dan partisipasi aktif (participatory). Hasil pengabdian menunjukkan bahwa dari sejumlah UMKM yang dijangkau, lima pelaku usaha berhasil memperoleh NIB setelah didampingi secara teknis dan personal. Meskipun jumlahnya belum signifikan secara kuantitatif, capaian ini menunjukkan keberhasilan pendekatan edukatif partisipatif dalam meningkatkan literasi legalitas dan kepercayaan diri pelaku UMKM. Kebaruan dari program ini terletak pada penggunaan media edukasi berbasis video sebagai dukungan berkelanjutan, serta pembentukan pola komunikasi informal yang membangun relasi jangka panjang antara pelaku usaha dan pendamping. Temuan ini mengindikasikan bahwa intervensi berbasis konteks lokal mampu mendorong perubahan sosial secara bertahap dan berkelanjutan.

Kata Kunci: legalitas usaha, UMKM pedesaan, NIB, OSS, partisipatif, pemberdayaan digital

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia, berkontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja (Tarru & Tarru, 2024). Dengan jumlah mencapai 65,5 juta unit yang mencakup 99% dari seluruh unit usaha, UMKM membuktikan kapasitas mereka dalam menopang perekonomian, terutama selama krisis global seperti pandemi COVID-19 (Tarru & Tarru, 2024). Namun, meskipun UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, di tingkat lokal, banyak UMKM di daerah pedesaan seperti Desa Sriwedari, Muntilan, Magelang, masih menghadapi tantangan dalam hal legalitas usaha. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, mayoritas UMKM di desa ini beroperasi tanpa Nomor Induk Berusaha (NIB), yang merupakan syarat utama dalam perizinan usaha (Khotimah & Surhatono, 2023).

Keberadaan NIB sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pelaku UMKM, serta menerapkan operasional yang lebih profesional dalam kerangka Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 (Andriani, 2022). Selain sebagai bentuk legalitas, NIB juga menjadi akses utama bagi UMKM dalam memperoleh berbagai fasilitas pemerintah, seperti kredit usaha rakyat, kemudahan ekspor, serta partisipasi dalam tender proyek pemerintah (Indrawati & Rachmawati, 2021). Namun, banyak pelaku UMKM di masyarakat

masih menghadapi kendala dalam mengurus legalitas usaha, terutama terkait dengan pemahaman prosedur administrasi dan akses terhadap sistem *Online Single Submission* (OSS) (Pramesti et al., 2022). Ketidaktahuan tentang prosedur pendaftaran NIB dan kesulitan mengakses OSS menjadi hambatan utama bagi UMKM di Desa Sriwedari dalam memperoleh legalitas usaha. Tanpa adanya NIB, mereka mengalami keterbatasan dalam mengakses modal usaha, peluang ekspor, serta kemitraan dengan lembaga lain (Pramesti et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan program edukasi dan pendampingan agar UMKM dapat memahami serta mengurus legalitas usaha mereka secara mandiri (Bulgis et al., 2023).

Upaya peningkatan legalitas UMKM melalui sosialisasi dan pendampingan telah menunjukkan hasil yang positif dalam berbagai penelitian. Salah satu penelitian yang dilakukan di Kelurahan Tlumpu menunjukkan bahwa pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan penggunaan platform *Online Single Submission* (OSS) berhasil meningkatkan pemahaman para pelaku UMKM mengenai legalitas usaha dan mendaftarkan usaha mereka ke lembaga dalam OSS (Aji Putra et al., 2022). Contoh lain dapat dilihat dalam penelitian di Kelurahan Sananwetan, di mana sosialisasi dan pendampingan meningkatkan kesadaran akan pentingnya legalitas usaha, dengan sebagian besar UMKM di sana sebelumnya tidak memiliki NIB, yang kemudian mendapatkan pendampingan dalam proses pengurusannya (Pramesti et al., 2022). Selanjutnya, di Desa Bulusari, penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi terkait memperkenalkan konsep legalitas, di samping pemasaran digital, telah memberikan dukungan bagi pelaku UMKM untuk mengatasi kendala yang mereka hadapi dan mengembangkan usaha lebih lanjut (Sholikhah et al., 2023).

Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa STIS Syubbanul Wathon melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Ramadhan 1446H berinisiatif untuk melakukan edukasi dan pendampingan bagi pelaku UMKM di Desa Sriwedari agar mereka dapat memahami pentingnya legalitas usaha dan memperoleh NIB secara mandiri. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya legalitas usaha, mendampingi mereka dalam proses pendaftaran NIB melalui OSS, serta menganalisis dampak kepemilikan NIB terhadap perkembangan usaha mereka, khususnya dalam akses pembiayaan dan kemitraan bisnis. Selain itu, melalui bimbingan teknis dan praktik langsung, diharapkan pelaku UMKM dapat memperoleh keterampilan dalam mengurus legalitas usaha secara mandiri, sehingga dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar yang lebih luas. Dengan adanya strategi pemberdayaan melalui edukasi dan pendampingan ini, diharapkan semakin banyak UMKM di Desa Sriwedari yang memiliki legalitas usaha yang sah, sehingga mampu berkembang secara lebih profesional dan berkelanjutan.

METODE

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), yaitu metode penelitian aksi partisipatif yang menekankan keterlibatan langsung masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan, merancang solusi, melaksanakan tindakan, dan mengevaluasi hasil bersama dengan subjek sasaran, dalam hal ini pelaku UMKM di Desa Sriwedari (Purnawan et al., 2020). Metode PAR terdiri dari tiga tahapan utama: (1) *Research* (penelitian), dilakukan melalui observasi dan survei untuk menggali permasalahan utama terkait rendahnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB); (2) *Action* (tindakan), berupa pelaksanaan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan teknis dalam pendaftaran NIB menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS); serta (3) *Participatory* (partisipatif), di mana pelaku UMKM didorong untuk berperan aktif dan terlibat langsung dalam seluruh

proses kegiatan, sehingga terbentuk kemandirian administratif (Setyawan et al., 2022).

Tahapan awal pelaksanaan kegiatan dimulai dengan observasi dan survei kepada pelaku UMKM secara *door-to-door*, untuk memperoleh data mengenai jumlah UMKM yang belum memiliki NIB serta memahami hambatan utama yang mereka hadapi, baik dari sisi pengetahuan maupun akses teknologi. Hasil survei menjadi dasar dalam penyusunan materi edukasi dan strategi pendampingan.

Tahap selanjutnya adalah sosialisasi dan edukasi, dilakukan dalam bentuk penyuluhan kelompok kecil mengenai pentingnya legalitas usaha dan prosedur pembuatan NIB. Kemudian dilanjutkan dengan pendampingan teknis pendaftaran NIB, di mana mahasiswa memberikan bimbingan langsung dalam pengisian data di sistem OSS, pengunggahan dokumen yang diperlukan, serta menangani kendala teknis secara individual. Metode *one-on-one mentoring* diterapkan agar pelaku UMKM memahami alur pendaftaran dan mampu melakukan proses serupa secara mandiri di masa mendatang.

Tahapan terakhir adalah penyerahan dokumen NIB yang telah berhasil didaftarkan, disertai dengan evaluasi program. Evaluasi dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi hasil berupa jumlah UMKM yang berhasil mendapatkan NIB serta tingkat pemahaman mereka terhadap pentingnya legalitas usaha.

Melalui metode PAR ini, pengabdian diharapkan tidak hanya menyelesaikan permasalahan jangka pendek seputar perizinan UMKM, tetapi juga menumbuhkan kesadaran hukum, meningkatkan literasi digital, dan memperkuat kemandirian pelaku usaha di pedesaan dalam menghadapi tantangan administrasi usaha ke depan.

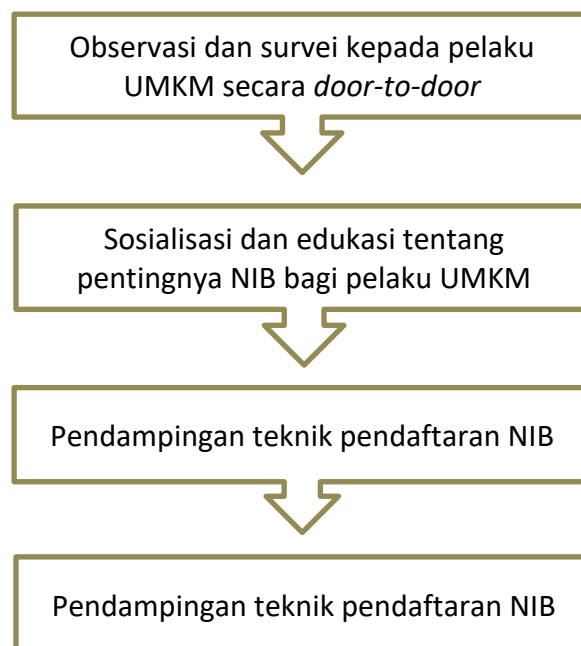


Diagram 1. Tahap pelaksanaan program kerja KKN

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pengabdian ini dilatarbelakangi oleh kondisi nyata yang ditemukan di Dusun Ngoman Lor, Desa Sriwedari, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, di mana mayoritas pelaku UMKM belum memiliki legalitas usaha, terutama Nomor Induk Berusaha (NIB). Padahal, legalitas usaha merupakan salah satu aspek penting yang dapat mendorong

penguatan ekonomi lokal, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan kepercayaan konsumen. Dalam konteks tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberdayakan pelaku UMKM melalui pendekatan edukatif dan pendampingan langsung dalam proses pembuatan NIB menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS).

Metode yang digunakan dalam program ini adalah *Participatory Action Research* (PAR), yang memadukan proses identifikasi permasalahan, implementasi tindakan, dan pelibatan aktif masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena mampu menciptakan transformasi sosial yang berkelanjutan, dengan menjadikan pelaku UMKM tidak sekadar sebagai objek perubahan, tetapi sebagai subjek yang aktif dalam proses pengembangan kapasitas dan legalitas usaha mereka. Secara garis besar, tahapan kegiatan meliputi penelitian awal (*research*), pelaksanaan tindakan (*action*), dan keterlibatan partisipatif (*participatory*), yang masing-masing akan dijelaskan secara rinci berikut ini.

1. *Research* (Penelitian)

Tahapan awal dalam program ini dilakukan melalui observasi langsung untuk mengidentifikasi kondisi pelaku UMKM dan pemetaan terhadap potensi serta hambatan yang mereka hadapi. Observasi dilakukan secara *door-to-door* ke rumah dan tempat usaha pelaku UMKM. Kegiatan ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat memperoleh data yang lebih akurat serta membangun komunikasi awal yang nyaman dan terbuka. Hasil observasi menunjukkan bahwa masih ada pelaku UMKM yang dijumpai belum memiliki NIB, bahkan sebagian besar tidak mengetahui keberadaan sistem OSS. Usaha yang mereka jalankan bersifat mikro, informal, dan berskala rumahan, seperti warung kelontong, usaha makanan ringan, dan kerajinan tangan.

Selama proses kunjungan, ditemukan juga adanya anggapan dari pelaku usaha bahwa legalitas usaha hanya dibutuhkan oleh pelaku bisnis besar. Beberapa pelaku UMKM menyatakan bahwa mereka enggan membuat NIB karena khawatir akan dikenai pajak atau biaya tambahan. Ada pula yang mengaku tidak percaya diri karena merasa tidak memiliki cukup pengetahuan dan fasilitas untuk mengurus sendiri. Temuan ini sejalan dengan studi sebelumnya oleh Pramesti et al., (2022) yang menunjukkan bahwa hambatan terbesar legalitas UMKM di daerah pedesaan bukan hanya soal akses teknologi, tetapi juga mindset dan persepsi terhadap perizinan. Informasi ini menjadi dasar penting dalam merancang intervensi yang kontekstual dan solutif.

Tidak semua pelaku UMKM dapat dijangkau atau ditemui selama pelaksanaan observasi. Beberapa di antaranya sedang berada di luar kota, tidak ada di rumah saat dikunjungi, atau menolak dengan sopan karena kesibukan. Oleh karena itu, mahasiswa fokus pada pelaku UMKM yang bersedia berdialog dan membuka diri terhadap proses pendampingan. Dari sinilah muncul kesadaran bahwa pendekatan komunikasi yang persuasif, sabar, dan membina menjadi kunci utama dalam membangun kedekatan dengan masyarakat. Data yang diperoleh dari tahap ini kemudian digunakan untuk merancang pendekatan edukasi dan pendampingan yang lebih personal dan relevan dengan situasi di lapangan.



Gambar 1. Obeservasi Pelaku UMKM
Kerajinan Pigura



Gambar 2. Obeservasi Pelaku UMKM
Budidaya Jamur

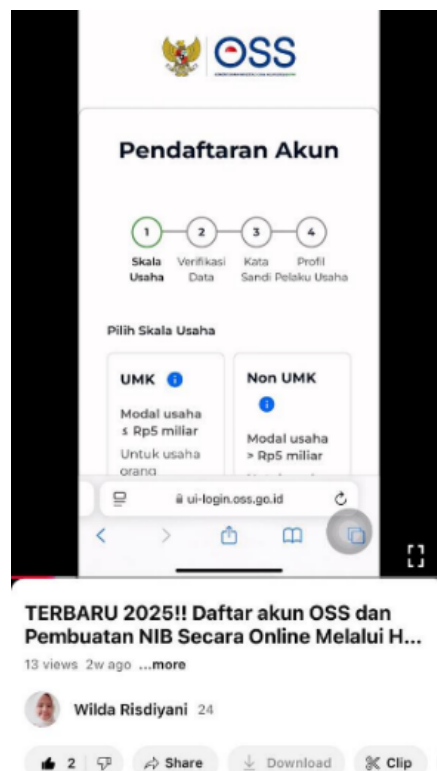
2. *Action* (Tindakan)

Setelah memahami kondisi dan permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM, kegiatan dilanjutkan ke tahap tindakan melalui sosialisasi, edukasi, dan pendampingan teknis pembuatan NIB menggunakan sistem OSS. Edukasi dilakukan secara tatap muka dengan bahasa sederhana dan pendekatan yang komunikatif. Materi yang disampaikan meliputi pengertian NIB, manfaat legalitas usaha, cara membuat akun OSS, serta tahapan proses yang harus dilalui hingga dokumen NIB berhasil dicetak. Kegiatan edukasi ini dirancang untuk menyentuh sisi logika dan emosional pelaku usaha, dengan memberikan contoh konkret manfaat NIB, seperti akses terhadap bantuan pemerintah atau modal usaha.

Untuk memperkuat pemahaman dan memfasilitasi pelaku UMKM yang tidak dapat

bertemu secara langsung, mahasiswa membuat video edukasi yang berisi tutorial lengkap penggunaan OSS versi terbaru. Video tersebut diunggah di YouTube dan dibagikan kepada pelaku usaha melalui *WhatsApp*, agar dapat diakses ulang secara mandiri kapan saja. Kehadiran video ini sangat membantu pelaku usaha yang tidak memiliki kesempatan ikut edukasi langsung atau ingin mengulang pemahaman setelah pendampingan. Selain itu, metode ini memungkinkan program menjangkau masyarakat lebih luas meskipun waktu KKN terbatas.

Proses pendampingan teknis dilakukan secara personal. Mahasiswa membantu pelaku UMKM mulai dari pembuatan akun email, pendaftaran di OSS, hingga pemilihan KBLI yang sesuai dan pencetakan NIB. Beberapa pelaku usaha mengalami kendala seperti tidak memiliki ponsel berbasis Android, keterbatasan jaringan internet, atau kebingungan saat memilih kategori usaha. Oleh karena itu, sebagian proses dilakukan di posko KKN untuk memastikan efisiensi dan keberhasilan. Dari total pelaku UMKM yang dijangkau, hanya lima pelaku usaha yang bersedia untuk didampingi hingga selesai dan berhasil memperoleh NIB. Meskipun jumlah ini tergolong kecil, proses pendampingan ini menjadi pembelajaran yang kuat, baik bagi pelaku usaha maupun mahasiswa, bahwa perubahan tidak selalu diukur dari kuantitas, tetapi dari dampak dan kualitas keterlibatan.



Gambar 3. Video edukasi OSS
Pada YouTube



Gambar 4. Proses edukasi dan pendampingan pembuatan NIB pelaku UMKM

3. *Participatory* (Partisipatif)

Tahapan ini menekankan pada pelibatan langsung pelaku UMKM dalam setiap proses kegiatan, dari pemetaan masalah hingga penyelesaian. Selama kegiatan berlangsung, pelaku usaha tidak hanya menjadi penerima edukasi atau instruksi teknis, tetapi turut mempraktikkan sendiri langkah-langkah yang dijelaskan. Mereka diajak untuk mengikuti tutorial OSS sambil langsung mencoba membuat akun, memilih kategori usaha, dan mengisi data secara mandiri dengan supervisi dari mahasiswa. Dengan cara ini, pelaku UMKM menjadi lebih percaya diri, tidak hanya karena berhasil mendapatkan NIB, tetapi karena merasa mampu menyelesaikan proses secara mandiri.

Setelah kegiatan pendampingan, pelaku UMKM diberikan ruang untuk menyampaikan refleksi, testimoni, atau pertanyaan lanjutan. Beberapa dari mereka menyampaikan bahwa sebelumnya merasa takut atau tidak percaya diri untuk mengurus legalitas usaha, namun setelah mengikuti proses, mereka justru merasa lebih bersemangat untuk mengembangkan usaha ke depan. Bahkan dua pelaku UMKM menyatakan keinginan untuk membantu tetangga atau rekan usahanya agar juga bisa membuat NIB. Ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif dalam kegiatan bukan hanya menumbuhkan pengetahuan, tetapi juga menularkan semangat dan kesadaran kolektif dalam komunitas.

Sebagai bentuk keberlanjutan, mahasiswa membuka layanan konsultasi OSS melalui *WhatsApp* pribadi. Dengan cara ini, pelaku usaha dapat menghubungi jika di kemudian hari mengalami kesulitan, ingin menanyakan langkah tambahan, atau bahkan berbagi pengalaman. Strategi ini diterima dengan baik karena bersifat informal, praktis, dan memberikan rasa kedekatan yang lebih manusiawi. Dalam konteks pengabdian, upaya seperti ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak berhenti pada output, tetapi pada seberapa kuat dampaknya dalam membentuk pola pikir dan keberlanjutan perubahan sosial.

Dokumen NIB yang berhasil diperoleh melalui proses pendampingan kemudian dicetak dan diserahkan kepada masing-masing pelaku UMKM. Penyerahan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku usaha tidak hanya menyelesaikan proses secara digital, tetapi juga menerima bukti fisik legalitas usahanya yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan administratif. Proses ini menegaskan ketercapaian output program dalam bentuk konkret, serta menunjukkan bahwa pelaku usaha yang terlibat telah melalui tahapan pembelajaran dan pendampingan secara utuh. Meskipun jumlah pelaku usaha yang berhasil memperoleh NIB masih terbatas, keberhasilan tersebut menunjukkan efektivitas pendekatan edukatif partisipatif yang disesuaikan dengan konteks dan karakteristik lokal. Temuan ini sekaligus memperkuat bahwa pendampingan berbasis kebutuhan riil masyarakat dapat mendorong akselerasi legalitas usaha mikro di tingkat desa secara bertahap dan berkelanjutan.



Gambar 5. Penyerahan NIB
pada pelaku UMKM

KESIMPULAN

Program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Dusun Ngoman Lor, Desa Sriwedari, membuktikan bahwa strategi pemberdayaan UMKM melalui edukasi dan pendampingan legalitas usaha dapat mendorong transformasi sosial yang berkelanjutan. Dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), kegiatan ini tidak hanya mengidentifikasi persoalan rendahnya kepemilikan NIB, tetapi juga membangun kesadaran hukum dan literasi digital di kalangan pelaku usaha mikro. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM masih belum memiliki NIB dan kurang memahami pentingnya legalitas, baik karena keterbatasan informasi maupun persepsi keliru tentang pajak dan prosedur administrasi. Dari total pelaku UMKM yang dijangkau, lima pelaku usaha berhasil memperoleh NIB melalui proses pendampingan teknis yang intensif. Meskipun secara kuantitatif tergolong kecil, capaian ini memiliki nilai strategis dalam membentuk model edukatif yang berorientasi pada kemandirian dan keberlanjutan. Peningkatan pemahaman dan semangat pelaku usaha untuk membantu sesama dalam proses legalitas menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif mampu menumbuhkan kesadaran kolektif dan semangat

gotong royong sebagai modal sosial penting dalam pembangunan desa. Keterlibatan aktif masyarakat serta keberadaan media edukatif yang berkelanjutan, seperti video tutorial OSS, menjadi penanda bahwa pemberdayaan UMKM berbasis konteks lokal dan kebutuhan riil dapat menjadi strategi efektif dalam akselerasi legalitas usaha di tingkat akar rumput.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji Putra, C., Aprilia, N. N., Novita Sari, A. E., Muhammad Wijdan, R., & Rafidah Putri, A. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui *Online Single Submission* (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 149–157. <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397>
- Andriani, C. (2022). Pemberdayaan UMKM Dengan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha Melalui OSS Di Kelurahan Krembang Selatan Surabaya. *PATIKALA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 406–413. <https://doi.org/10.51574/patikala.v2i1.487>
- Bulgis, U. M., Yulianti, L., Istiyanti, N., Riniati, R., & Wibisono, S. (2023). Branding Produk Dan Pendampingan Legalitas Usaha UMKM Di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Applied*, 2(1), 63. <https://doi.org/10.19184/jpma.v2i1.39469>
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231–241. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113>
- Khotimah, S. K., & Surhatono, E. (2023). The Effect Of MSMEs And Manpower On Economic Growth Of Tuban District. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 11(1), 73–83. <https://doi.org/10.31846/jae.v11i1.536>
- Oktaviani Tarru, R., & Eirene Tarru, H. (2024). Pemberdayaan Umkm Sebagai Usaha Meningkatkan Kualitas Pemasaran Produk di Lembang Tadongkon. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 3(2), 203–208. <https://doi.org/10.58344/locus.v3i2.2475>
- Purnawan, A., Khisni, A., & Adillah, S. U. (2020). Penyuluhan hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kota Semarang melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS). *Indonesian Journal of Community Services*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.30659/ijocs.2.1.1-10>
- Setyawan, N. A., Wibowo, B. Y., & Sagita, L. (2022). Pendampingan Legalitas UMKM PKH Graduasi Melalui Sistem *Online Single Submission* di Kecamatan Suruh. *Prapanca : Jurnal Abdimas*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.37826/prapanca.v2i1.229>
- Sholikhah, R., Ulhaq, I. D., & Laili, N. (2023). Pemberdayaan Pelaku UMKM Melalui Digital Marketing. *Al-Ijtima': Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 243–254. <https://doi.org/10.53515/aijpkm.v3i2.64>
- Thineza Ardea Pramesti, Thufaila Azizah, R., Nurbayzura, W., Azim Permana, K., Putri Aqila, N. D., Sulistyowati, I., Ahbab, T., Setyorini, A., Pandu Khrisna, G., Febriani, S., & Aji Putra, C. (2022). Pendampingan Legalitas UMKM NIB Melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) Di Kelurahan Sananwetan, Sananwetan, Kota Blitar. *PATIKALA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 385–392. <https://doi.org/10.51574/patikala.v2i1.479>